

**Penolakan Masyarakat Terhadap Verifikasi Penetapan Arah Kiblat Oleh Badan Hisab Rukyat Kemenag Kota Pekalongan di Pekalongan**

**Miskiyah<sup>1</sup>, Muslih Husein<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: miskiyahsoni@gmail.com

**Abstract**

*Qibla is one of the conditions for the validity of prayer, but in fact the problem of Qibla direction is a problem for Muslims. In the City of Pekalongan, the problem of the Qibla of mosques/mushola is still a lot less accurate and inappropriate, but when the mosque/mushola was re-measured and the results were not in accordance with the Qibla they used to be, they did not receive the results of the leverage from the BHRD of the Ministry of Religion of Pekalongan City, instead they preferred the previous Qibla direction because they believe more in their ancestors. This paper examines how the attitude of the BHRD of the Ministry of Religion of Pekalongan City in responding to the community regarding the lever of Qibla direction by the BHRD of the Ministry of Religion and why the people of Pekalongan City refuse to verify the Qibla direction carried out by the BHRD of the Ministry of Religion of Pekalongan City. The theory used in determining the Qibla direction of the Ministry of Religion of Pekalongan City BHRD using the basis of the Qur'an, Al Hadith, with the trigonal ball formula and how the steps for determining the Qibla direction are, but in reality this theory does not apply to people who reject the lever of direction. The direction of the Ministry of Religion of Pekalongan City for several reasons and it turns out that theory and practice are not the same.*

**Keywords:** *Community, Qibla Direction, Rejection Verification*

**Abstrak**

Kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat, akan tetapi pada kenyataannya masalah arah kiblat ini masih menjadi problematika bagi umat Islam dimanapun. Di Kota Pekalongan masalah kiblat masjid/mushola masih banyak yang kurang akurat dan tidak sesuai, akan tetapi ketika masjid/mushola diukur ulang dan hasilnya tidak sesuai dengan kiblat yang dulu mereka tidak menerima hasil verifikasi dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan justru mereka lebih memilih arah kiblat yang dulu karena lebih percaya kepada nenek moyang mereka. Paper ini ada mengkaji tentang bagaimana sikap BHRD Kemenag Kota Pekalongan dalam menyikapi masyarakat tentang penolakan verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kemenag dan mengapa masyarakat Kota Pekalongan menolak

adanya verifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh BHRD Kemenag Kota Pekalongan. Teori yang digunakan dalam penetapan arah kiblat BHRD Kemenag Kota Pekalongan dengan menggunakan dasar dari Al Qur'an, Al Hadist, dengan rumus trigonal bola dan bagaimana langkah-langkah penetapan arah kiblatnya, namun pada kenyataannya di masyarakat teori tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang menolak verifikasi arah kiblat Kemenag Kota Pekalongan dengan beberapa alasan dan ternyata teori dan praktek tidak sama

**Keywords:** Arah Kiblat, Masyarakat, Penolakan Verifikasi

## Pendahuluan

Problematika tentang penentuan arah kiblat selalu menarik untuk didiskusikan di kalangan umat muslim di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pekalongan pada khususnya. Telah dibuktikan pula banyak media social yang memberitakan bahwa masjid dan mushola kiblatnya kurang akurat, kurang pasnya kiblat ini bukan terdapat disalah satu tempat saja akan tetapi di semua tanah air dari sabang sampai meroke juga dalam daerah yang samapun terdapat perbedaan yang sangat jelas, memang tentang arah kiblat memang tidak dapat dihindari, sehingga akibat probelematika ini tidak jarang bahkan sering terjadi perbedaan bahkan sengketa sesama golongan mereka sendiri sering berselisih pendapat tentang arah kiblat tersebut bahwa merekalah yang paling benar dan lainnya tidak benar sehingga menimbulkan pemahaman di kelompok mereka jika shalat menghadap kiblat masjid dan mushola tersebut tidak sah. (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/19/107150-mui-minta-masjid-sesuaikan-arah-kiblat>)

Di Kota Pekalongan ditemukan bahwa masih banyak persoalan tentang verifikasi arah kiblat dari dilakukan BHRD dan menjadi persoalan yang sensitif diantara umat islam. Mengenai gejolak dan perselisihan ini sebab tidak adanya tanggapan bahkan respon remeh juga tidak mau tahu masyarakat ketika akan membangun masjid juga mushola untuk penetapan arah kiblat yang benar (Ridwan, 1993, p. 83). Sehingga timbul perbedaan-perbedaan dalam penentuan arah kiblat ini bisa terjadi sebab pada nenek moyang mereka dulu menandai arah kiblat menggunakan kira-kira saja sehingga ada anggapan kalau arah kiblat adalah ke barat dan pengertian demikian itulah hingga kini masih mereka pegang sebagai pedoman dalam menentukan arah kiblat. Hal tersebut merupakan suatu anggapan yang semestinya. Dan anggapan tersebut harus diluruskan kembali sebab secara pemahaman ilmu bumi tentu dengan mempelajari bagaimana bentuk bumi seperti bola maka Indonesia tidak berada di timur Mekah, namun berada di Tenggara, sehingga arah kiblat Indonesia seharusnya menghadap kearah barat agak nyerong ke utara. (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2009, p.31-32)

Maka dari itu bahwa kebenaran tidak bisa dipungkiri ketika timbul perbedaan arah kiblat itu dikarenakan respon kurang peduli dari masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi dalam proses pembangunan masjid dan mushola, mereka lebih cenderung percaya pada tokoh dikalangan mereka sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kepada mereka mengenai

persoalan tersebut dan tidak meminta bantuan pada pakar falak yang bisa dijadikan panutan tentang keakuratan arah kiblatnya, jadi bukan persoalan yang aneh ketika keputusan dari kiyai itu sangat mereka agungkan walaupun akhirnya terlihat salah ketika penentuan arah kiblat tersebut tidak akurat, persoalan ini biasanya karena masyarakat yang kolot juga belum terbuka pemikirannya dan kenyataan yang tidak bisa dielakan ketika mengenai permasalahan tersebut dan membuat bingung adalah ketika fatwa MUI mengatakan kalauletak geografis Indonesia adalah di sebelah timur baitullah sehingga kiblat orang muslim di Indonesia yaitu menghadap kearah barat.

Tulisan ini adalah hasil penelitian langsung terhadap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, dan informasi juga data yang sesungguhnya adalah melalui tatap muka dan berhadapan dengan tokoh masyarakat, takmir masjid, jamaah dan masyarakat disekitar masjid dan mushola tersebut. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam membantu dalam pelaksanaan verifikasi ini menunjukkan bahwa beberapa pandangan dari masyarakat seperti takmir dan tokoh masyarakat juga peran dan langkah yang dilakukan oleh tim BHRD dalam melakukan verifikasi arah kiblat, masyarakat mengharapkan dengan pembimbingan, penyuluhan juga disosialisasikan dengan terbuka, sehingga jamaah, para ulama dan takmir masjid di daerah itu kalau dilokasi itu akan ada verifikasi arah kiblat jadi mereka sudah siap.

Akan tetapi mereka yang tidak menerima tetap dalam pendiriannya dalam hal penentuan arah kiblat tetap menyerahkan masalah penentuan arah kiblat kepada mereka sepenuhnya dengan kyai di daerah itu, kiranya persoalan itu tidak mungkin ketika mereka lebih mempercayai kyai tiba-tiba harus menolak keputusan kyai itu terus harus mengikuti BHRD tentang arah kblat yang baru, sedangkan ada sosok yang memiliki pengaruh, juga memiliki wibawa dari kalangan sendiri maka sosok tersebut akan selalu dipercaya untuk persoalan penentuan arah kiblat masjid dan mushola di mana mereka tinggal, sesungguhnya banyak kejadian dari sebagian jamaah masjid dan mushola di Kota Pekalongan bahwa arah kiblat yang kurang akurat lebih-lebih bangunan yang sudah lama sekali, sehingga mereka ingin meluruskan bahwa arah kiblat yang pas dan akurat itu bagaimana dan seperti apa, jadi dari beberapa masjid dan mushola di Kota Pekalongan yang mengalami kekurang akuratan arah kiblatnya, dan atas munculnya persoalan bahwa arah kiblat banyak yang tidak akurat disebabkan lempeng bumi yang bergeser mengakibatkan banyak jamaah yang galau karena arah kiblat nya kurang pas akhirnya timbul keraguan dalam menghadap kiblat jadi membuat sebagian masyarakat ingin membongkar masjid dan musholanya untuk dibangun kembali sesuai arah kiblat yang sudah disesuaikan ukuran kiblatnya, akan tetapi yang lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama akhirnya beberapa kalangan masyarakat meminta pertimbangan kepada berbagai pihak untuk segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini karena menerima kritikan dari berbagai pihak Kementerian Agama Kota Pekalongan dan Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) akan melakukan verifikasi arah kiblat bagi masjid dan

mushola di Kota Pekalongan untuk menghindari kemungkinan ketidak akuratan arah kiblat seperti yang diduga sering terjadi selama ini.

Secara bertahap masjid dan mushola akan dilakukan verifikasi arah kiblat. Caranya dengan mengubah shof, sedangkan yang akan membangun masjid dan mushola supaya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan keragu-raguan di masyarakat. Banyak respon dari masyarakat mengenai upaya penelusuran kiblat ini, dimana diantara mereka ada yang mau menerima bahkan ada pula yang menolak verifikasi tersebut dan kembali ke kiblatnya semula dengan berbagai alasan, faktor masyarakat lebih mewarnai pengukuran didaerah tersebut karena kepercayaan mereka kepada para pendahulunya, hal ini dikarenakan sejarah telah mencatat bahwa kiblat yang dahulu adalah menganut pada para wali songo, pemikiran mereka yang kolot tetap beranggapan tokoh terdahululah yang harus dianut, menurut mereka wali songo adalah penyebar agama islam setelah para sahabat nabi dan yang paling dipercaya pada waktu itu sampai sekarang, mereka tidak menyadari bahwa zaman semakin maju dan alat untuk pengecekan kiblat itu lebih bagus juga ilmu bumi juga yang menjadi perhitungan juga semakin bagus kemajuan dari waktu ke waktu sama juga perkembangan kualitas juga kapasitas intelektual yang masyarakat islam punyai pada saat ini.

Kemajuan pengukuran arah kiblat pada masa sekarang ini bisa rasakan ketika perbedaan yang besar juga dilakukan oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga K.H Ahmad Dahlan juga bisa lihat melalui peralatan yang pakai buat mengeceknya menggunakan bencet atau rubu, istiwa, kayu atau tongkat miqyas, juga mujayab, kompas, theodalite dan lain-lain, kemudian daripada itu perhitungannya menggunakan sistem yang canggih, baik dengan titik koordinat maupun melalui sistem ilmu ukurnya Dengan munculnya fenomena problematika seputar arah kiblat ini pun berkembang, apalagi dengan adanya kemajuan IMTEK juga informasi melalui internet juga membahas mengenai arah kiblat. Terkait adanya pembahasan mengenai arah kiblat ada berbagai tema pokok diantaranya adalah:

1. Hasil tentang temuan dari sejumlah ahli falak bahwa ternyata tidak sedikit masjid dan mushola masih kurang akurat arah kiblatnya.
2. Secara geografis bentuk bumi seperti bola maka Indonesia tidak berada di timur Mekah namun di tenggara, sehingga seharusnya arah kiblat Indonesia menghadap ke barat sedikit nyerong ke utara
3. Karena kepercayaan mereka kepada para pendahulunya dikarenakan sejarah mencatat bahwa pengukuran masjid dan mushola tersebut dilakukan oleh wali songo
4. Masjid dan mushola yang arah kiblatnya berubah karena pergeseran lempeng bumi dan akibat gempa bumi yang bertubi tubi
5. Fatwa MUI yang membenarkan kalau letak geografis Indonesia ada di sebelah timur makkah jadi kiblat umat muslim di Indonesia adalah kearah barat

Dari paparan diatas memang begitu penting agar bisa mengerti arah kiblat yang akurat dalam kitab-kitab fikih diterangkan jika menghadap kiblat adalah menjadi syarat sahnya shalat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

*Ishak bin Mansyur menceritakan kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, Ubaidilah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiyi dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda : "Bila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudhu lalu menghadap kiblat kemudian berta'birilah" .(Khafid, 2009, p. 17)*

Umat muslim dalam melaksanakan ibadah terlebih mengenai shalat jadi arah yang dituju adalah kiblat, karena menghadap kearah ka'bah di masjidil Haram menjadi syarat sahnya ibadah tersebut. Kata arah kiblat ada dua kata ialah, arah adalah jurusan, tujuan, juga yang lain mengartikan sebagai jarak dan dekat yang di ukur menggunakan lingkaran besar pada permukaan bumi, dan jihat dari arti yang lain, azimuth juga syathrah, adapun kiblat diartikan ka'bah dan berdiri didalam masjidil haram di Makkah. (Izzudin, 2012, p.23) Sebagian telah menyepakati bahwa mengarah ke kiblat dalam melaksanakan sholat hukumnya wajib. Penyariatannya menghadap kiblat ketika pelaksanaan ibadah antara lain berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 149-150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - ١٤٩ - وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - ١٥٠ -

*"Dan dari mana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada apa yang kamu kerjakan dan darimana saja kamu (keluar) maka palingkanlah, maka palingkanlah wajahmu ke arah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja), dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (Shihab, 2004, p. 12).*

Dalam penyelesaian pengoreksian arah kiblat di tengah masyarakat tidak semuanya berjalan mulus, ada beberapa yang menerima dan ada sebagian yang menolak verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD)

## Metode Penelitian

Paper ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang membahas pendapat masyarakat muslim di Kota Pekalongan dalam menyikapi verifikasi arah kiblat oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam menetapkan arah kiblat untuk pembangunan masjid dan mushola. Data Primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan berbagai responden meliputi takmir masjid, ulama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi social keagamaan, anggota masyarakat, jamaah masjid/mushola dan pejabat pemerintah. Data Sekunder bersumber dari buku-buke, kitab, jurnal, majalah, makalah tentang bangunan masjid dan mushola, arah kiblat masjid/mushola dan arah kiblat jamaah dalam menjalankan ibadah shalat di masjid/mushola.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kemenag Kota Pekalongan dalam Menyikapi Masyarakat yang Menolak Verifikasi Arah Kiblat

Arah kiblat memiliki posisi penting dalam membangun masjid- mushola akan tetapi masih banyak masjid dan mushola yang arah kiblatnya berubah dari sesungguhnya sebab ketika akan membuat bangunan tersebut tidak di ukur dengan benar. Di beberapa lokasi, sebagian pengurus masjid/mushola menyesuaikan dengan cara sedikit memiringkan karpet ke arah utara dengan memanfaatkan peristiwa rashdul kiblat atau saat posisi matahari tepat di atas bangunan Ka'bah berada sehingga bayangan benda tepat tegak lurus kearah kiblat. Warga juga bisa mengajukan bantuan kepada tim Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kementerian Agama untuk memverifikasi arah kiblat pada masjid / mushola yang dikelolanya. "Untuk Pelayanan tim (BHRD) dari kantor Kementerian Agama, kami melayani masyarakat yang ingin memverifikasi arah kiblat.

Dengan cara, pengurus masjid /mushola mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Sie GARA Syariah, Kementerian Agama, perihal 'Permohonan Verifikasi Arah Kiblat'. Surat tersebut dikirim ke alamat Kantor Kemenag di Jl.Majapahit No.7 Kota Pekalongan. Kementerian Agama kemudian akan mengirim tim (BHRD) dengan membawa perlengkapan memadai seperti theodolite, kompas, GPS, dan sebagainya ke lokasi. Langsung dari pakar ilmu falak dan Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) untuk pelayanan verifikasi pengukuran arah kiblat.

Diketahui :

Lintang Ka'bah	: 21° 25'	Lintang Utara
Bujur Ka'bah	: 39° 50'	Bujur Timur
Lintang Pekalongan	: -06° 55'	Lintang Selatan
Bujur Pekalongan	: 109° 41'	Bujur Timur

$$a. \quad 90^\circ - (-06^\circ 55') = 96^\circ 55'$$

(adalah busur yang terletak di antara titik kutub Utara dengan lintang Pekalongan)

$$b. \quad 90^\circ - (21^\circ 25') = 68^\circ 35'$$

(adalah busur yang terletak di antara titik kutub Utara dengan lintang Ka'bah)

$$c. \quad 109^\circ 41' - 39^\circ 50' = 69^\circ 51'$$

(adalah selisih antara bujur Ka'bah dengan bujur Pekalongan)

Rumus Arah Kiblat

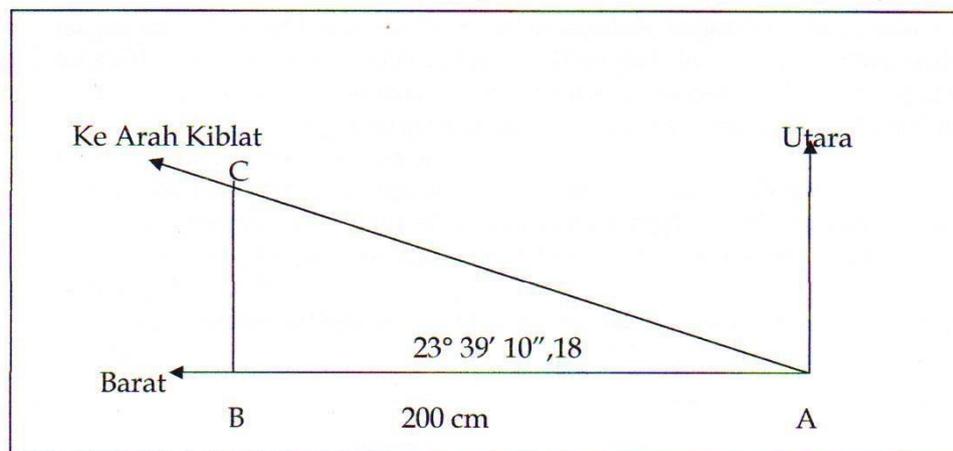
$$\begin{aligned} \text{Ctg B} &= \text{ctg } b \cdot \sin a \sin c - \cos a \cdot \text{ctg } c \\ &= \text{ctg } 68^\circ 35' \cdot \sin 96^\circ 55' \sin 69^\circ 51' - \cos 96^\circ 55' \cdot \text{ctg } 69^\circ 51' \\ &= 0,414\ 762\ 767\ 6 - (-0,044\ 188\ 719\ 8) \\ &= 0,458\ 951\ 487\ 5 \\ &= \mathbf{24^\circ 39' 10'', 18} \text{ (diukur dari titik Barat ke Utara)} \\ &= 90^\circ - 24^\circ 39' 10'', 18 \\ &= \mathbf{65^\circ 20' 49'', 82} \text{ (diukur dari titik Utara ke Barat)} \end{aligned}$$

Catatan :

Bila dalam menentukan arah Utara – Selatan menggunakan KOMPAS MAGNIT, maka arah kiblat Pekalongan yang mestinya  $24^\circ 39' 10'', 18$  dari titik Barat ke Utara, dikurangi VARIASI MAGNETIC  $1^\circ$  sehingga menjadi  $23^\circ 39' 10'', 18$

**Gambar 1**

Skema Pengukuran Arah Kiblat



Diketahui :

$$\begin{aligned} AB &= 200 \text{ cm} \\ A &= 23^\circ 39' 10'', 18 \\ BC &= 200 \times \tan 23^\circ 39' 10'', 18 \times 1 \text{ cm} \\ &= 87,597\ 538\ 2 \text{ cm} \\ &= 87,6 \text{ cm (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil wawancara terhadap BHRD Kemenag Kota Pekalongan, menurut beliau Bapak Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag beliau selaku anggota Tim BHRD dan ahli

falak dari IAIN Pekalongan mengatakan seharusnya masyarakat perlu memahami dan mempelajari tentang arah kiblat yang kaitannya dengan dasar-dasar penetapan arah kiblat baik menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi dasar penentuan arah kiblat, dan masyarakat juga harus memahami bagaimana teknik-teknik yang digunakan apakah sesuai dengan ilmu geografi apa tidak, juga masyarakat harus bisa memahami atau mengetahui tentang geografis ka'bah, berapa lintang dan bujurnya. Sehingga mereka juga harus mengetahui dimana posisi mereka tinggal sehingga bisa dilakukan penentuan arah kiblat dengan rumus dan teori segitiga bola atau dengan trigonometri yang bisa menghasilkan arah kiblat yang akurat. Menurut beliau masyarakat juga harus mengetahui ketika masjid atau mushola mereka sebelum dibangun apakah yang mengukur arah kiblatnya benar-benar orang yang ahli atau hanya dengan mengira-ngira saja, dan sebaiknya masyarakat ketika menolak harus mempunyai dasar-dasar yang kuat jangan hanya menolak akan tetapi tidak berdasar sehingga tidak ada argumen yang kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya teori dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. (wawancara dengan bapak Drs. H. M. Muslih Husaein, M.Ag. Tim BHRD Kemenag Kota Pekalongan juga ahli falak dari IAIN Pekalongan, 12 Juni 2020)

Adapun menurut hasil wawancara dari Bapak Drs. H. M. Thohirun selaku Penyelenggara Syariah yang menangani tentang permasalahan arah kiblat di lingkungan Kemenag Kota Pekalongan menyampaikan adanya masyarakat menolak verifikasi arah kiblat yaitu mungkin bahasanya kurang bisa dipahami oleh sebagian masyarakat mungkin kalau dengan bahasa yang mereka pahami bukan mengukur ulang akan tetapi mengoreksi ulang mungkin masyarakat bisa memahami, dan kalau sudah dipahami masyarakat tinggal kita sampaikan hasil pengukuran ulang tadi dengan bahasa yang bisa dipahami pula oleh masyarakat, hasil kita kita sampaikan bahwasannya hasil verifikasi tersebut hasilnya menghadap ke barat agak serong ke utara bukan lurus ke barat, dan setelah disampaikan, dipersilahkan memilih hasil yang baru apa yang lama dan ketika mereka menerima verifikasi yang baru tanpa harus membongkar bangunan namun dengan cara merubah shafnya saja. Dan ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban tentang kebenaran dan keakuratan arah kiblat tersebut maka kita jelaskan secara ilmu, bahwasannya pengukuran arah kiblat ini dengan dasar Al-Quran, Al-Hadist, dan dengan rumus-rumus secara falakiah semua itu bisa dipertanggungjawabkan, dan setelah mendapatkan hasil yang terupdate terbaru kita sampaikan kepada masyarakat untuk memilih diantara menerima atau menolak hasil verifikasi tersebut. Dari paparan diatas maka disimpulkan bahwa teori dan kenyataan juga tidak ada kesamaan yangmana dari Kemenag sendiri tidak tegas terutama untuk bangunan masjid dan mushola yang sudah berdiri sejak lama dan keyakinan kiblat seseorang ketika akan mendirikan sholat yang dibenarkan oleh sebagian ulama'. (wawancara dengan bapak Drs. H. M. Thohirun selaku penyelenggara Syari'ah Kemenag Kota Pekalongan, 3 Juli 2020)

Analisis hasil wawancara Bapak Drs. Mohammad Yahya selaku kasi Bimas Islam kemenag Kota Pekalongan menyampaikan kalau arah kiblat itu memang wajib sebab merupakan syarat sahnya ibadah sholat, menurutnya verifikasi arah kiblat BHRD Kemenag Kota Pekalongan perlu adanya sosialisasi kembali sebab dengan adanya sosialisasi tentang arah kiblat sebagai jalan untuk menyatukan dua perbedaan pendapat antara yang menolak dan yang menerima verifikasi tersebut. Dari Kementerian Agama sendiri dalam menentukan pengukuran arah kiblat sudah bisa dipertanggungjawabkan, sebab dalam penentuan arah kiblat sudah menggunakan alat yang canggih, dengan rumus trigonometri atau segitiga bola sesuai dengan bentuk bumi yang di yakini berbentuk bundar, juga dengan dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist jadi sudah sangat kuat. Untuk itu kementerian Agama berharap agar masyarakat menerima verifikasi arah kiblat tersebut, namun pada prakteknya masyarakat tidak sedikit yang menolak adanya verifikasi tersebut lebih-lebih bangunan masjid dan mushola yang sudah puluhan tahun, mereka lebih mempercayai adanya orang-orang yang telah mengukur sebelum masjid dan mushola itu dibangun. Bararti bisa disimpulkan bahwa masyarakat lebih mempercayai nenek moyang mereka dari pada BHRD Kemenag Kota Pekalongan berarti teori dan praktek didalam masyarakat ada perbedaan dan tidak sejalan. (wawancara dengan Bapak Drs. Mohammad Yahya selaku kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Pekalongan, 8 Juli 2020)

Analisis hasil wawancara dengan Kepala Kankemenag Kota Pekalongan beliau Bapak Drs. H. Maksun beliau mengatakan memang masalah arah kiblat itu masih menjadi problematika dalam masyarakat bukan hanya di Kota Pekalongan saja melainkan di Kota dan desa manapun tentang arah kiblat memang masih ada perbedaan pendapat dari sebagian ulama' mengatakan bahwa arah kiblat Indonesia adalah menghadap kebarat sebab Indonesia berada disebelah timur mekah dan dari sebagian qoul mengatakan mengenai orang yang jauh dari mekah boleh dengan jihadul ka'bah dan belum lagi tentang masyarakat yang lebih percaya pada kiblat yang dulu karena kiblatnya pasti sudah pas karena orang dulu mengikuti ulama, jadi wajar saja kalau dari sebagian masyarakat ada yang tidak menerima dan benar-benar menolak verifikasi dari BHRD Kementerian Agama dimanapun lebih-lebih di Kota Pekalongan, Walupun dari Kemenag sendiri telah berupaya untuk membuat masyarakat menerima hasil verifikasi arah kiblat tersebut, walaupun dari BHRD telah menyampaikan bagaimana teori dan rumus, juga dasar yang kuat dari Al-Qu'an, Al-Hadist dan dengan ilmu falakiyah juga alat-alat yang kita gunakan bisa dipertanggungjawabkan akan tetapi dari sebagian masyarakat tetap pada pendiriannya tetap belum bisa menerima hasil verifikasi tersebut dan mereka juga setuju adanya verifikasi Kemenag tersebut akan tetapi mereka menolaknya. Bapak Drs. Maksun mengatakan bahwa Kemenag mempunyai kebijakan akan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan harus mengikuti hasil verifikasi kemenag tersebut, mereka menolak juga mempunyai alasan. Dari hasil wawancara maka bisa kita analisis bahwa Teori dan praktek tidak sesuai. (wawancara dengan bapak Drs.H.Maksum selaku Kepala Kemenag Kota Pekalongan, pada 14 Juli 2020)

## 2. Analisis Penolakan Masyarakat Terhadap Verifikasi Penetapan Arah Kiblat dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan

Analisis hasil wawancara dari ta'mir masjid Al Mubarak Kuripan Lor Gg. 14 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, menurut Bapak Ustad Abdul Aziz secara pribadi mengenai verifikasi dari BHRD Kementerian Agama sangat mendukung namun masyarakat disekitar masjid Al Mubarak belum tentu menerimaverifikasi tersebut karena beranggapan bahwa arah kiblatnya menghadap kebarat sesuai dengan tokoh masyarakat yang dahulu, karena Indonesia terletak disebelah timur Ka'bah maka kiblatnya menghadap kebarat, dan tidak perlu diukur lagi karena sudah diukur oarang dulu tidak mungkin salah sebab mereka juga mengikuti para ulama dan wali songo. Dan dengan berjalannya waktu ketika masjid akan direhab terjadi kegoyahan diantara mereka dan terjadi perbedaan pendapat diantara mereka tentang verifikasi arah kiblat tersebut dan pada akhirnya mereka mendukung dan menerima hasil verifikasi arah kiblat dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan. Adapun solusi yang diambil untuk menyatukan dua pendapat yaitu dengan cara mengadakan musyawarah dengan mengundang pakar falak dan perwakilan dari BHRD Kemenag untuk menjelaskan bagaimana teori penentuan arah kiblat, apa dasar-dasar yang diambil dan rumus apa saja yang meraka pergunakan juga bagaimana langkah-langkah dalam perhitungannya, pada akhirnya mereka bisa menerima verifikasi tersebut. Dari kesimpulan yang kita ambil adalah bahwasannya masyarakt menolak karena tidak mengerti dan tidak tahu tentang pengukuran arah kiblat, setelah mereka memahami dan mengetahui sudah bisa dipastikan masyarakat pasti akan menerima verifikasi arah kiblat. Berarti kedepan Kementerian Agama harus lebih sering mensosialisasikan verifikasi arah kiblat kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham akan pentingnya arah kiblat yang akurat dan pada akhirnya mereka menerima verifikasi arah kiblat dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan. (Wawancara Takmir masjid Al Barokah Kuripan Lor Gg.14 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan bapak Ustadz Abdul Aziz, pada 15 Juni 2020)

Analisis Hasil wawancara dengan Takmir Mushola Baitul Muttaqin Tirto Gg. VII Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, beliau bapak ustadz Mahsun mengatakan bahwasannya beliau pribadi sangat mendukung dengan adanya verifikasi BHRD Kemenag Kota Pekalongan, akan tetapi disisi lain beliau juga tidak ingin memenangkan egonya sendiri dan mengorbankan pendapat banyak orang, maka bapak ustadz Mahsun menyampaikan tentang masyarakat disekitar mushola Baitul Muttaqin menolak adanya verifikasi Kemenag Kota Pekalongan antara lain yaitu mereka meyakini bahwa sholat itu tidak karena kiblat melainkan karena Allah jadi mereka yakin saja dengan apa yang telah ditetapkan oleh tokoh pendahulu mereka yang telah menetapkan arah kiblat walaupun mereka sadar bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat, dan alasan selanjutnya yaitu selain masalah di atas, juga masalah berkurangnya jumlah kapasitas jamaah dikarenakan kalau diubah shaf atau sajadahnya maka akan berkurang kapasitas jama'ah dan alasan lain adalah masyarakat disekitar mushola Baitul Muttaqin masih trauma dengan kejadian delan tahun lalu, yangmana pernah terjadi pertengkar

yang hebat antar kelompok yang menginginkan perubahan dan yang tidak mau menerima perubahan arah kiblat, sekitar delapan tahun yang lalu sering terjadi antara makmum dan Imam berbeda arah dikarenakan ego mereka masing-masing dan akhirnya salah satu dari mereka tidak berjamaah di mushola tersebut, akhirnya sampai sekarang mushola Baitul Muttaqin tetap menggunakan arah kiblat yang dulu dan tidak berfikir untuk merubahnya lagi. Pada intinya masyarakat dan takmir menolak adanya verifikasi demi menjaga kerukunan antar jamaah, berarti teori yang digunakan oleh BHRD Kemenag Kota Pekalongan tidak sesuai yang diharapkan.

Analisis hasil wawancara dengan takmir mushola Al Mubarak Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekaongan dengan bapak Ustadz Saifurrohman, beliau mengatakan bahwa mengenai tanggapan masyarakat memang ada tiga persepsi antara lain yang pertama bagi mereka yang dulu pernah mengukur arah kiblat maka mereka tidak setuju adanya verifikasi, yang kedua bagi mereka yang kolot pemikirannya dan mengukuhkan bahwa orang dulu itu lebih pintar dari orang sekarang pasti tetap tidak mau mengikuti, dan yang ketiga adalah orang yang pemikirannya melenial pasti akan menerima hasil verifikasi tersebut. Menurut bapak saifurrohman tentang penolakan dan perbedaan pendapat berlangsung cukup lama sampai-sampai diantara mereka sampai memilih tidak jama'ah di mushola tersebut dan lebih memilih sholat dirumah, dan untuk menyatukan dua pendapat yang berbeda ternyata tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi pada akhirnya dengan kesepakatan bersama dalam keputusan musyawarah. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah masyarakat disekitar mushola Al Mubarak ada dua pendapat, dari sebagian masyarakat menerima dan sebagian lagi menolak verifikasi arah kiblat dari BHRD, namun dengan berjalannya waktu dan atas kesepakatan bersama dalam musyawarah akhirnya masyarakat disekitar mushola Al Mubarak bisa menerima hasil verifikasi kemenag tersebut. (wawancara dengan takmir mushola Al Mubarak Medono Pekalongan beliau bapak Ustadz Saifurrohman) Intinya masyarakat pada awalnya menolak dan pada akhirnya masyarakat bisa menerima verifikasi BHRD Kemenag Kota Pekalongan.

Analisis hasil wawancara dengan bapak Drs. KH. Abdul Fatah Yasran beliau selaku Takmir masjid Agung Jami' Kota Pekalongan, secara pribadi sangat mendukung verifikasi arah kiblat, masalah verifikasi arah kiblat memang perlu disosialisasikan sebab masyarakat memang tidak paham tentang arah kiblat sehingga masyarakat menolak verifikasi arah kiblat tersebut dan masjid Agung jami' Pekalongan sebenarnya arah kiblatnya memang dulu sudah diukur namun ketika diverifikasi ternyata kurang sedikit akan tetapi karena masyarakat disekitar masjid ada perbedaan pendapat tentang arah kiblat ada yang menerima dan adapula yang menolak hasil verifikasi tersebut dan sesuai kesepakatan masyarakat dan tokoh juga takmir masjid akhirnya diputuskan hasil verifikasi tersebut diterima akan tetapi arah kiblat tetap menggunakan arah kiblat yang lama. (Hasil wawancara takmir masjid Agung Jami' Pekalongan beliau bapak Drs.KH Abdul Fatah Yasran) Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah mereka menerima hasil verifikasi

BHRD Kemenag Kota Pekalongan namun tetap menggunakan arah kiblat yang lama walaupun sudah mendapat sertifikat pengukuran arah kiblat akan tetapi mereka lebih megutamakan kerukunan daripada perpecahan, ternyata teori dan prakten tidak sesuai.

Analisis hasil wawancara dengan takmir masjid Walid Ibnu Al Walidi di Jalan Jlamprang Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Beliau Bpk Ustadz Djumhan, secara pribadi mendukung adanya verifikasi arah kiblat BHRD Kemenag, namun tidak pada masjid yang beliau emban saat ini disebabkan karena masjid pada waktu di bangun sudah diukur sama nenek moyang mereka, mereka punya dasar tentang Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia adalah menghadap kebarat, dan ada qoul yang mengatakan bila kita jauh dari bangunan Ka'bah maka arah kiblatnya boleh dengan jihatul Ka'bah. (hasil wawancara dengan takmir masjid Walalad Ibnu Al Walidi di Jl.Jlamprang dengan Bapak Ustadz Djumhan, 17 Juni 2020 ) Adapun kesimpulan dari Analisis ini yaitu bahwa takmir dan masyarakat menolak adanya verifikasi arah kiblat BHRD Kemenag Kota Pekalongan, berarti teori dan prakteknya tidak ada persamaan.

Analisis hasil wawancara dengan takmir mushola At Taqwa di Boyongsari gedangan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beliau bapak Ustadz Amat Rochim mengatakan bahwa secara pribadi mendukung adanya verifikasi dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan karena arah kiblat itu salah satu dari syarat sahnya sholat, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat ternyata berbeda tidak sedikit dari masyarakat yang tidak menerima verifikasi ini, seperti contoh di mushola yang beliau kelolapun mengenai verifikasi arah kiblat tersebut mengundang perdebatan antar kelompok, menurut kelompok A Merekalah yang paling benar dan dari kelompok B juga menganggap merekalah yang benar akhirnya saling berbeda pendapat tentang arah kiblat, dan kedua kelompok tersebut juga punya argumen masing-masing. Menurut bapak Amat Rochim untuk mendamaikan mereka tidaklah mudah perlu waktu yang lama dan harus berhati supaya tidak menyinggung mereka, solusinya yaitu dengan cara musyawarah bersama dan beliau mengundang pakar falak untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana cara penetapan arah kiblat yang benar, pada akhirnya masyarakat bisa menerima verifikasi tersebut. Inti dari analisis ini adalah kenapa masyarakat menolaknya yaitu kurang pahamnya masyarakat tentang arah kiblat dan verifikasi BHRD Kemenag tersebut. (wawancara dengan takmir masjid At Taqwa di boyongsari gedangan Kec. Pekalongan Utara Kota Peakalongan ) Tugas BHRD Kemenag Kota Pekalongan selanjutnya adalah untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang teori penetapan arah kiblat sehingga masyarakat bisa menerima verifikasi arah kiblat tersebut.

Analisis hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kota Pekalongan dan Beliau adalah termasuk Kyai yang sangat karismatik juga di disegani masyarakat Kota Pekalongan, beliau mengatakan secara pribadi menolak adanya verifikasi arah kiblat BHRD Kemenag Kota Pealongan dengan alasan, bahwa menghadap kiblat dengan yakin'ainul kiblat itu berlaku bagi mereka yang berada dekat dengan masjidil harram, Ada yang melihat'ainul kiblat dengan dhonni walaupun sebelum sampai yakin dan ketentuan

ini berlaku bagi mereka yang jauh dari masjidil haram, dan menurut pendapat keempat mazhab juga mengatakan bahwa orang yang jauh dari ka'bah maka kiblatnya dengan menggunakan jihadul ka'bah, jadi menurut beliau dari beberapa alasan itu sangat kuat. (wawancara dengan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan tentang pendapat beliau tentang verifikasi BHRD Kemenag Kota Pekalongan, 17 Juni 2020)

### **3. Analisis Terhadap Sikap Kemenag dan Masyarakat**

Dari analisis hasil wawancara dari BHRD Kementerian Agama Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa teori yang dipergunakan oleh BHRD Kemenag Kota Pekalongan tentang verifikasi arah kiblat ternyata masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat, walaupun tidak sedikit masyarakat yang menerima hasil verifikasi arah kiblat tersebut, akan tetapi besar harapan dari BHRD Kemenag Kota Pekalongan bahwa masyarakat bisa menerima verifikasi tersebut agar arah kiblat mereka bisa sesuai dan akurat, sebab walaupun Kemenag mempunyai kebijakan akan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengharuskan masyarakat menerima hasil verifikasi tersebut dan mudah-mudahan kedepan Kementerian Agama lebih banyak mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan- kegiatan yang berkenaan dengan verifikasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan bisa menerima sepenuhnya.

Dari seluruh analisis diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat sebagian besar menolak adanya verifikasi arah kiblat dari BHRD Kementerian Agama Kota Pekalongan. Dengan alasan bahwa masyarakat lebih percaya pada nenek moyang mereka juga dari sebagian masyarakat lebih memilih mengikuti qoul yang mengatakan bahwa orang yang jauh dengan ka'bah kiblatnya bisa dengan jihadul ka'bah dan tentang Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke barat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis maka selanjutnya dapat penulis simpulkan bahwa sikap Kementerian Agama Kota Pekalongan tentang penolakan verifikasi arah kiblat adalah dengan dua pilihan boleh mengikuti hasil ijtihad tersebut atau tetap seperti pengukuran semula karena Kementerian Agama mempunyai Kebijakan akan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan masyarakat supaya menerima hasil ukur ulang atau verifikasi tersebut akan tetapi Kementerian Agama berharap supaya masyarakat agar bisa menerima sebab dari Kementerian Agama sendiri juga dalam memverifikasi ada dasar yang kuat yaitu dari Al Qu'an dan Al Hadist juga teknik penetapan arah kiblatnya pun sesuai dengan ilmu geografi juga menggunakan alat-alat yang bisa dipertanggungjawabkan dan semua itu merupakan ijtihad untuk berusaha supaya arah kiblat masjid dan mushalla di Kota Pekalongan tepat ke arah bangunan ka'bah di Mekkah Al Mukarromah. Alasan masyarakat menolak verifikasi arah kiblat dari BHRD Kementerian Agama Kota Pekalongan yaitu sesuai kesepakatan masyarakat muslim di lokasi penelitian penulis bahwa Indonesia yang berada jauh dari Kota Mekah maka arah

kiblatnya menghadap ke barat disebabkan karena Indonesia terletak disebelah timur Kota Mekah, masjid dan mushalla sebelum dibangun sudah diukur arah kiblatnya oleh orang-orang yang terdahulu dan sudah di *pandom* pasti sudah benar karena mereka juga mengikuti para ulama dan mereka juga mengikuti fatwa-fatwa kiyai yang berpendapat bahwa kita bisa menggunakan ainul yakin saja bahwa kiblat masjid dan mushalla sudah pas posisi dengan ka'bah Al Mukarromah.

### Daftar Pustaka

- Ferry. (2010). Kementerian Agama *verifikasi Arah Kiblat*. Jakarta : republika.
- Khaldun, Ibn. Tth. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Iskandariyah : Daarul Baidhu.
- Izzudin, Ahmad. (2010). *"Menentukan Arah Kiblat Praktis"* Walisongo Pres.
- Izzudin,Ahmad. (2012).*ilmu falak praktis*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra.
- Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,fatwa terbaru 2010 kiblat*. Jakarta : MajelisUlama Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin.
- Anwar, Syamsul. (2009). *Pedoman Hisab Muhamadiyah*. Yogyakarta : Majelis tarjih dan Tajdid pp Muhamadiyah.
- Ridwan, Kafrawi et al (eds ). 1993. *Enslkopedi Islam*. Jakarta : Inter massa.
- Shihab, M. Quraish. 2004.*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Kesetiaan Al-Qur'an*. Vol. 6. Jakarta : Lentera Hati.
- Solikin, Agus. 2013.*Perhitungan arah Salat*. Semarang : Pascasarjana IAIN Semarang.
- T., Djamaludin. 2009. *Penyempurnaan Arah Kiblat dari Bayangan Matahari, Makalah perkuliahan Astromomi*.
- Syariah dan hukum diktum, volume 15, Nomor 2, Desember 2017 : 247-260 Bustanul Iman RN Sekolah Tinggi Islam (STAI) DDIAD Mangkoso "Peran Arah Kiblat terhadap ibadah sholat".
- Skripsi :
- Khudhori, Ismail.2005. S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *"Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta"*.
- Nuroni,Evi Dahliyatun.2010. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *"Pengaruh Pergeseran Lempengan Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Yogyakarta"*
- Makalah :
- Khafid, *Penentuan Arah Kiblat*, Makalah Pelatihan *Penentuan Arah Kiblat*, Cibinong, 22 Februari 2009
- PMA :
- Penyelenggara syariah,(sesuai PMA nomor 13 tahun2012 pasal 431 ayat 1)mempunyai tugas melakukan pelayanan,bimbingan teknis,pembinaan,serta pengelolaan data di bidang pembinaan syariah

Penyelenggara syariah, (sesuai PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 431 ayat 1) mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data di bidang pembinaan syariah

Wawancara :

Hasil wawancara kepada bapak Abdul azis selaku takmir masjid al Barokah Kuripan lor Gg, 14 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, *tentang penolakan verifikasi dari BHRD* pada hari Kamis, Tanggal 29 Mei 2020 jam 08.30-10

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Mohammad Yahya selaku kasi Bimas Islam *"tentang sikap kemenag terhadap penolakan verifikasi arah kiblat oleh BHRD"* pada hari Rabu 08 Juli 2020 pukul 08.45-09.30 di ruang Bimas Islam Kemenag Kota Pekalongan

Hasil wawancara dengan takmir mushala Baitul Muttaqin beliau adalah bapak mahsun *"tentang alasan penolakan masyarakat terhadap verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kota Pekalongan"* pada hari Sabtu 06 Juni 2020 pukul 16.00-1630

Hasil wawancara dengan takmir mushala Baitul Muttaqin beliau adalah bapak mahsun *"tentang alasan penolakan masyarakat terhadap verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kota Pekalongan"* pada hari Sabtu 06 Juni 2020 pukul 16.00-1630

Hasil wawancara bersama takmir masjid Agung Jami' Pekalongan beliau bapak Abdul Fatah *"tentang penolakan masyarakat terhadap verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kota Pekalongan"* pada hari Senin 13 Juli 2020 pukul 11.00-11.40 di kantor Masjid Agung Jami' Pekalongan

Hasil wawancara dengan takmir masjid Kholid Ibnu Al Walid *"tentang tanggapan takmir dan masyarakat tentang penolakan terhadap verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kota Pekalongan"* pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 pukul 12.30-13 20

Hasil wawancara dengan masyarakat disekitar masjid Kholid Ibnu Al Walid *"tentang arah kiblat yang kurang sesuai sebab semua arah kiblat masjid dan musala sebenarnya tidak salah mungkin ada faktor lain yang menjadi arah kiblat tersebut kurang sesuai"* Sabtu tanggal 11 Juli 2020

Hasil wawancara bersama takmir musala At Taqwa Boyongsari gedangan *"tentang bagaimana masyarakat dan takmir masjid dalam menyikapi verifikasi arah kiblat oleh BHRD Kota Pekalongan"* Hari Ahad 12 Juli 2020 pukul 08.45-09.30

Wawancara dengan bapak Drs. H. M. Muslih, M. Ag pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 11.15 *"tentang sikap BHRD kepada masyarakat yang menolak verifikasi arah kiblat"*

Wawancara dengan bapak Drs. H. M. Thohirun selaku kasi Gara Zawa : *"tentang sikap BHRD atas penolakan verifikasi arah kiblat"* pada hari Jum'at, 3 Juli pukul 09.00-10.30 WIB

Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan beliau Bapak Drs. H. Maksum *"tentang kebijakan kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan"*

*mengenai arah kiblat ” pada hari kamis Jum’at tanggal 10 Juli 2020 pukul 09.15-10.00 di ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan*

Wawancara dengan Bpk. Athoilah Malik S.Ag Selaku Pelaksana Seksi Bimas Islam di Bidang Kemasjidan pada tanggal 30 Desember 2019 jam 09.30 – 11.00 di ruang Bimas Islam Kota Pekalongan”*tentang sistem informasi masjid (SIMAS)” dan keadaan masjid di Kota Pekalongan*

Penyelenggara syariah,(*sesuai PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 431 ayat 1*) mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data di bidang pembinaan syariah.

Internet :

Artikel Prof. Thomas Djamaluddin, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>, yang berjudul “*Problematika Arah Kiblat*”.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/19/107150-mui-minta-masjid-sesuaikan-arah-kiblat>

<http://www.detiknews.com/read/2010/01/21/192331/1283624/10/arah-kiblat-alami-pergeseran,dpr.meminta-turunkan-tim>

<http://kotapekalongan.kemenag.go.id/berita/read/pengukuran-arah-kiblat-di-hotel-horison-pekalongan>

[Kotapekalongan.kemenag.go.id](http://kotapekalongan.kemenag.go.id)